**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)**

***Oleh :***

**Abdus Somad**

**Fakultas Ekonomika & Bisnis/Jurusan Akuntansi**

 **Universitas kanjuruhan Malang**

*e-mail :* *abdus.somad17@gmail.com*

Drs. Anwar Made, M.SI.,AK.,CA

Doni Wirshandono Y, SE.,M.AK.,CA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, penelitian ini dilakukan mulai tanggal 16 Mei Sampai 26 Mei 2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsionate stratified random sampling*; sampel ini kemudian ditentukan oleh 65 pegawai dari SKPD. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik, setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas wilayah pelaporan keuangan parsial atau bersama-sama positif berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

**Kata kunci:** Laporan keuangan, aksesibilitas, akuntabilitas

1. **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: (1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara; (2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Steccolini (2002) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu accountability (akuntabilitas) dan decision usefulness (pengambilan keputusan).

Mulgan (1997) dalam Sukhemi (2010) meneliti mengenai proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari pelayan masyarakat kemudian menuju ke arah menteri, parlemen, pengadilan dan ombudsman baru menuju ke arah masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga -lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo,2006).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Data hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015. Dari pemeriksaan 504 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini secara keseluruhan berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26,38% ke 44,59%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 61,54%. Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dari data diatas adanya kenaikan yang signifikan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Namun dari peningkatan tersebut masih banyak pemerintah daerah yang belum mendapatkat opini WTP dari BPK RI terutama di tingkat Kabupaten dan Kota. Hal ini ada faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Menurut hasil audit BPR RI IHPS 1 Tahun 2015 mengungkapkan 8.019 temuan (78,97% dari 10.154 temuan) yang memuat 12.170 permasalahan (78,85% dari 15.434 permasalahan). Permasalahan itu meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.136 (50,42%) ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,39 triliun.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laoran keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tesebut (Steccolini (2002) dalam aliyah dan Nahar (2012). Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pemerintah Daerah Kota Malang merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, penyajiannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah ini dibuktikan pada pembentukan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014. Namun, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WDP DPP) yang menunjukkan peningkatan opini dikarenakan pemerintah Kota Malang telah melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidak patuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian LKPD (IHP BPK-RI, 2015). Opini WTP yang diberikan BPK tidak mengartikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Malang tidak membutuhkan koreksi, masih ada beberapa pemeriksaan yang perlu perbaikan utamanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintahan tersebut.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN**
2. **Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

1. **Aksesibiltas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al,* 1990, dalam Rohman, 2009).

1. **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Akseblitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

1. **METODEOLOGI PENELITIAN**
2. **Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti membuat ruang lingkup penelitian agar membatasi cakupan penelitian supaya tidak melenceng dari pokok permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan pada seluruh staf yang berada di sub bagian keuangan karena mereka lebih memahami tentang penyajian laporan keuangan, Penelitian ini dilakukan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada dilingkungan kota Malang.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf dan kepala bidang Akuntansi pada 3 (tiga) Badan dan 6 (enam) Dinas yang ada dilingkungan Kota Malang. Sampel yang dipilih yaitu dengan memilih kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan sebanyak 65 responden yang berada di 3 Badan dan Dinas daerah Kota Malang yang nantinya akan memberikan tanggapan atas kuesioner yang diberikan.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan pemerintah Kota Malang, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah seluruh staf dan kepala bidang keuangan pada 3 (tiga) Badan dan 6 (enam) Dinas yang terlibat dalam proses-proses pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat selaku stakeholder pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan kota Malang. Mereka mempunyai rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi, sehingga untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif, yang dalam hal ini dipilih dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Kota Malang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitatif, terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuisioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Malang.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)
2. Variabel dependen (terikat) dan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu -ragu , Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

1. **Pengujian Instrumen Penelitian**

Pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian

1. **Uji Validitas**

Pengujian ini dimaksudkan untuk dapat mempertanggungjawabkan ketelitian serta ketepatan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila nilai MSA di atas 0,5 (Kaiser & Rice, 1974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item -item yang memiliki faktor loading di atas 0,40 (Chia, 1995).

1. **Uji Reliabilitas**

Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuisioner dikata kan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuisioner-kuisioner penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach’s Alpha*. Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach’s Alpha*, menurut Sekaran (2003 : 311), secara umum apabila didapatkan nilai Cronbach’s Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak.

Alpha kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik.

1. **Teknik Analisis Data**
2. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tehnik analisis regresi yang digunakan dapat diinterpretasi atau hasil interpretasinya tidak bisa. Model regresinya diharapkan Best Linear Unbiased Estimation. Terdapat enam asumsi yang diperlukan dalam penaksiran OLS yaitu:

1. Rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan nol
2. Kesalahan pengganggu berbentuk distribusi normal
3. Kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan Variabel Independen
4. Tidak adanya Autokorelasi antar gangguan
5. Tidak adanya Multikolinearitas
6. Varian kesalahan pengganggu tetap atau homoskedastisitas (tidak terjadi Heteroskedastisitas)
7. **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Gozali :2001).

1. **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya.

Penggunaan nilai *tolerance* dapat menentukan kriteria model regresi yang baik

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

1. **Uji Hipotesis**
2. **Analisis Regeresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara serempak/simultan. Apakah variabel (X1), (X2), dan (X3) (kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP) masing-masing berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). digunakan model persamaan sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b2X3

 Keterangan:

Y = efektivitas pengelolaan keuangan daerah

a = konstanta

b1 = koefisien regresi untuk variabel independen kompetensi SDM

b2 = koefisien regresi untuk variabel independen penerapan SPIP

b3 = koefisien regresi untuk variabel independen penerapan SAP

X1 = kompetensi sumber daya manusia (SDM)

X2 = penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

X3 = penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP).

1. **Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)**

Uji hipotesis parsial (uji-t) menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial. Apakah variabel (X1) dan (X2), (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) masing-masing berpengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel (Y) yaitu akuntabilitas pengelola laporan keuangan Daerah Kota Malang.

1. **Koefisien Determinasi (R2)**

Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

1. **Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)**

Uji hipotesis secara serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Variabel Independen secara keseluruhan terhadap Variabel Dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Nilai Fhitung dari hasil pengolahan data dengan program SPSS dapat dilihat pada hasil uji analisis regresi linear berganda yaitu pada tabelANOVA.

1. **HASIL PENELITIAN**
2. **Deskripsi Data**

Dari 65 kuesioner yang disebar terdapat 54 kuesioner yang kembali, terdapat cacat dan tidak terisi sebanyak 4 eksemplar. Sehingga kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 50 eksemplar.

* 1. **Deskripsi Data Variabel**
1. **Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Indikator penyajian laporan keuangan daerah, responden cenderung menjawab setuju yakni sebesar 56%, sangat setuju sebesar 37%, ragu-ragu sebesar 4%, tidak setuju sebesar 1%, dan sangat tidak setuju sebesar 2%. Item-item pernyataan yang dilampirkan peneliti adalah item pernyataan positif, peneliti berharap responden akan memberikan tanggapan murni berdasarkan pengetahuannya mengenai pernyataan-pernyataan tersebut, semakin responden menjawab dengan jawaban positif atau SS (sangat setuju) maka nilainya semakin tinggi yakni 5, dan dengan hasil tersebut berarti secara umum menunjukkan responden cenderung memiliki respon yang baik terhadap penyajian laporan keuangan.

1. **Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Indikator Etika Profesi, responden cenderung menjawab setuju yakni sebesar 57%, sangat setuju sebesar 2%, ragu-ragu sebesar 8%, tidak setuju sebesar 8%, dan sangat tidak setuju 2%. Hal ini berarti secara umum responden cenderung memiliki respon yang baik terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan.

1. **Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah**

Indikator Akuntabilitas Laporan Keuangan, responden cenderung menjawab setuju yakni sebesar 56,73%, sangat setuju sebesar 39,04%, ragu-ragu sebesar 1,75%, tidak setuju sebesar 0,77%, sangat tidak setuju 1,73%. Hal ini berarti secara umum responden cenderung memiliki respon yang baik terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

1. **Uji Kualitas Data**
	1. **Uji Validitas Data**
2. **Variabel Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tabel hasil pengujian validitas yaitu dengan membandingkan nilai signifikan r table > r hitung 0,268 dinyatakan valid. Jumlah item pertanyaan pada variabel Penyajian Laporan Keuangan sebanyak 9 item pertanyaan. Dari hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Penyajian Laporan Keuangan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid.

1. **Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Tabel hasil pengujian validitas yaitu dengan membandingkan nilai signifikan r table > r hitung 0,268 dinyatakan valid. Jumlah item pertanyaan pada variabel aksesibilitas laporan keuangan sebanyak 3 item pertanyaan. Dari hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel teknologi informasi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid

1. **Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah**

Tabel Hasil pengujian validitas diatas yaitu dengan membandingkan nilai signifikan r table > r hitung 0,268dinyatakan valid. Jumlah item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan sebanyak 10 item pertanyaan. Dari hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas laporan keuangan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid..

* 1. **Uji Reliabilitas**

Nilai korelasi *product moment* (rhitung) untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0,06 (taraf signifikan 5% dan n = 52), sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data.

1. **Analisis Data**

**3.1 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap variabel-variabel penelitian terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuannya adalah agar data yang digunakan layak dijadikan sumber pengujian dan dapat dihasilkan kesimpulan yang benar. (Sugiyono, 2003). Berikut hasil masing-masing uji asumsi klasik :

1. **Uji Normalitas Data**

Dalam uji normalitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

1. **Uji Multikolinearitas**

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation (VIF)*.

Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah *tolerance* 0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Setiap analisa harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Dalam uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskesdastisitas pada regresi ini, sehingga model regresi yang dilakukan layak dipakai.

1. **Uji Hipotesis**

**4.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Persamaan regresi linier berganda sebagaimana pada ikhtisar *output SPSS* adalah:

Y = 4.985 + 0,878X1 + 0,374X2

Interpretasi dari persamaan regresi berganda di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 4.985 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0 (nol)
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) = 0,878, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,374 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah tetap/konstan.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) = 0,077, menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,117 satuan dengan anggapan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X1) adalah tetap/konstan.
4. Standar error (å) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

**4.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)**

1. **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan**

Hasil menunjukkan nilai t sebesar 11.378 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Apabila dilihat dari signifikansinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelola Keuangan.

1. **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

 Hasil menunjukkan nilai t sebesar 2.116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039. Apabila dilihat dari signifikansinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelola keuangan. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah positif, hal ini berarti meningkatkan persepsi responden terhadap aksesibilitas laporan keuangan daerah.

**4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,909 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 90,9%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,827 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporankeuangan) sebesar 82,7 % dan sisanya sebesar 17,3 % dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

* 1. **Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)**

Pengujian menunjukkan hasil f hitung sebesar 116.714 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Hipotesis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dikatakan signifikan karena nilai sig. variabel panyajian laporan keuangan daerah adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh

1. **Hipotesis Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig. 0,039 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana apabila nilai sig. variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1. **Hipotesis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil uji simultan atas variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa dilihat dari nilai sig. 0,000 dan 0,039 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana dengan nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Ada pengaruh yang signifikan dari Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah peneliti menyimpulkan semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah maka akan semakin efektif Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Malang.
3. Berdasarkan jawaban responden dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Malang. Dimana menurut masyarakat proses penyampaian, penyebarluasan dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Malang terlaksana secara baik.
4. **Saran**

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Malang harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna aksternal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya permerintah Kota Malang diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah daerah Kota Malang diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah Kota Malang terhadap masyarakat.
2. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisir praktek korupsi dan nepotisme oleh para aparatur sehingga clean government secara bertahap akan bisa terwujud.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara atau pertanyaan lisan. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa adanya wawancara atau pertanyaan lisan.
4. Pembahasan yang berkaitan dengan akuntabilitas publik sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan lebih rinci apabila penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif.
5. **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. (http://www.bpk.go.id, di akses pada tanggal 10 Maret 2016

Bandariy, Himmah. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.

Donaldson. Lex, Davis James H, 1991, “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return” Australian Journal of Management. Vol.16 iss. 1.

Haliah. 2012. “Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar

Katz, Ellen. 2004. Transparancy in Government- How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy. Juni 2004, hal. 1-2

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyana, Budi. 2006, Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No.1. Mei 2006.

Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi SektorPublik. Jakarta: Salemba Empat

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

* Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
* Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Undang-undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.

Safitri, Ratna Amalia. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Sagala, Marjuki. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Di Kabupaten Samosir). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public FinancialAdministration. UN DESA.

Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin. September 2002.

Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume 5, April: 85-100.